

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Radar Solo
Media Online

Wilayah: Kabupaten Wonogiri

Halaman 6

Dewan Sepakat Belum New Normal

Agar Masyarakat Tidak Terlenu

WONOGIRI, Radar Solo - DPRD Wonogiri mendukung keputusan pemkab yang belum menetapkan tatanan kenormalan baru. Artinya, disiplin penerapan protokol kesehatan harus tetap dijaga.

"DPRD sangat mendukung tidak *declare new normal*. Harapannya apa? Agar masyarakat tidak merasa euforia karena itu," terang Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno ditemui usai sidang paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksa-

naan APBD 2019 di gedung dewan setempat, kemarin (9/6).

Meskipun pemkab tidak menetapkan kejadian luar biasa (KLB) korona, namun DPRD mengapresiasi upaya pemkab yang melakukan sosialisasi secara masif.

"Pendekatannya pun secara kultural. Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dalam mendukung masyarakat," ujarnya.

Pendekatan secara kultural ini dianggap tepat diterapkan di Wonogiri. Sebab, masyarakat masih menjunjung tinggi kultur budaya setempat.

"Jangan sampai pengorbanan

besar yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wonogiri sia-sia karena masyarakatnya terlalu senang, merasa nyaman, euforia itu tadi," jelasnya.

Ditegaskan Setyo, seluruh komponen masyarakat harus terlibat aktif dalam memutus mata rantai penyebaran korona. Caranya dengan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti mengenakan masker ketika keluar rumah hingga rajin mencuci tangan dengan sabun.

Sementara itu, dalam penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 oleh Bupati Wonogiri Joko Sutopo yang dibacakan

Wakil Bupati Wonogiri Edy Santoso, setelah perubahan APBD, pendapatan daerah yang ditargetkan Rp 2.456.434.046.373, terealisasi Rp 2.442.677.972.827,15 atau 99,44 persen.

Disampaikan pula, setelah perubahan belanja dan transfer dianggarkan Rp 2.695.105.999.257,72 dan terealisasi Rp 2.455.975.319.572,87 atau 91,13 persen.

Laporan tersebut sudah dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini WTP ini adalah kelima

kalinya berturut-turut yang diraih oleh Kota Sukses.

"Kami apresiasi karena lima kali berturut-turut mendapatkan opini WTP. Ada beberapa yang ditanyakan dari fraksi-fraksi. Contohnya ada kegiatan yang hasilnya tidak maksimal. Lalu PAD (pendapatan asli daerah) kan targetnya terlewat. Ini apa karena targetnya terlalu rendah atau bagaimana," beber Setyo Sukarno.

Pertanyaan dari fraksi-fraksi itu akan terjawab, Kamis (11/6). Bisa diterima atau tidaknya laporan pertanggungjawaban masih akan melalui pembahasan lagi.

"Tanggal 18 akan ada sikap akhir fraksi," ucapnya. (al/wa)